



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 22 /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2016 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- c. bahwa dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan urutan skala prioritasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Lampung dan perubahan terhadap skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 /22/03/2017, tanggal 26 Januari 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
  2. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 /38 /02/2017, tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 /0987 /02/ 2017, tanggal 3 Mei 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
  4. Surat dari Gubernur Lampung Nomor : 188.44 /267 /02/ 2017, tanggal 6 Juli 2017 perihal Perubahan dan Penambahan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/13.01/2016 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Menyetujui perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada kolom 2 (dua) Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, sebelumnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah menjadi 47 (empat puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH.**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 NOMOR : 22 /DPRD.LPG/13.01/2017  
 TANGGAL : 15 Agustus 2017

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Hijau	Prakarsa Eksekutif	
2.	Pembentukan dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT.Penjamin Kredit Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
3.	Penanaman Modal	Prakarsa Eksekutif	
4.	Pola Tarif Rumah sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
5.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung	Prakarsa Eksekutif	
7.	Penambahan Modal Pada PT.Wahana Raharja	Prakarsa Eksekutif	
8.	Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah	Prakarsa Eksekutif	
9.	Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Prakarsa Eksekutif	
10.	Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.	Prakarsa Eksekutif	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11.	Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.	Prakarsa Eksekutif	
12.	Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan.	Prakarsa Eksekutif	
13.	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Bapemperda	
14.	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	Bapemperda	
15.	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Lampung	Komisi I	
16.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Komisi I	
17.	Sharing Pembiayaan Perlindungan Sumber Air Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumsi	Komisi II	
18.	Tata Kelola BUMD	Komisi III	
19.	Zonasi Energi Sumber Daya Mineral	Komisi IV	
20.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Provinsi Lampung	Komisi V	
21.	Pembentukan Peraturan Daerah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
22.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
23.	Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah	Prakarsa Eksekutif	

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
24.	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
25.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2016
26.	Retribusi Daerah	Prakarsa Eksekutif	
27.	Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2016
28.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.	Bapemperda	Luncuran Propemperda Tahun 2016
29.	Perlindungan Asas Kepemilikan Tanah	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2016
30.	Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung	Komisi I	Luncuran Propemperda Tahun 2016
31.	Distribusi Gabah di Provinsi Lampung	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2016
32.	Kemandirian Pangan	Komisi II	Luncuran Propemperda Tahun 2016
33.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2016
34.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2016
35.	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016
36.	Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai	Komisi IV	Luncuran Propemperda Tahun 2016
37.	Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2016
38.	Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.	Komisi V	Luncuran Propemperda Tahun 2016
39.	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
41.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT. Lampung Jasa Utama	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
42.	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Propemperda Tahun 2015
43.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Komisi III	Luncuran Propemperda Tahun 2015
44.	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
45.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tk. I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.	Bapemperda	Luncuran Prolegda Tahun 2012
46.	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
47.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Palau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2017-2037.	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2013

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Ttd**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH.**